

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian.....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Tahap Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	21
6. Lokasi Penelitian.....	21
<b>BAB II : TINJAUAN HUKUM MENGENAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA</b>	
A. Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia.....	23
1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	24
2. Keuntungan Menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	26
3. Jenis-jenis Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Men- urut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arb- ritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	29
4. Kekuatan Mengikat Hasi; Putusan Alternatif Penyelesaian Sengketa da Arbitase.....	48
B. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Prespektif Islam.....	52

**BAB III : OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PEMBENTUKAN  
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
DI BIDANG JASA KEUANGAN INDONESIA**

A. Otoritas Jasa Keuangan.....	55
1. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan di Indonesia.....	55
2. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.....	57
B. Pegadaian Sebagai Salah Satu Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia.....	60
1. Sejarah Pegadaian.....	60
2. Pengertian Gadaai.....	62
3. Peran Pegadaian dalam Sektor Jasa Keuangan.....	63
4. Bidang Usaha Pegadaian.....	65
C. Perusahaan Pembiayaan Sebagai Salah Satu Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia.....	66
1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan.....	66
2. Bidang Usaha Perusahaan Pembiayaan.....	67
D. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Indonesia.....	71
1. Latar Belakang Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.....	71
2. Pembantuan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengk- eta Sektor Jasa Keuangan.....	73
3. Prinsip-prinsip Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengk- eta Sektor Jasa Keuangan.....	75
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.....	76

**BAB IV : KEDUDUKAN BMPPI MENURUT PERATURAN OJK  
NOMOR 1/POJK.07/2014 TENTANG LEMBAGA ALTE-  
NATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA  
KEUANGAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR  
30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITASE DAN ALTE-  
RNATIF PENYELESAIAN SENNGKETA**

A. Pembentukan BMPPI menurut peraturan OJK Nomor 1/	
---	--

POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	79
B. Kedudukan BMPPI menurut peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	100
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	x
<b>LAMPIRAN</b> .....	xvi